



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,  
Telp: 0274 - 512688,512820



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
PENJELASAN GUBERNUR  
TENTANG  
NOTA KEUANGAN  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera buat kita semua*

- *Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;*
- *Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ;*
- *Yang kami hormati Saudara Sekda, beserta jajarannya;*
- *Yang kami hormati Rekan-Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.*

*Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY dengan acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY, terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan sehat wal 'afiat.*

Melalui kesempatan ini, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD DIY, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 25 Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD DIY, hari Senin tanggal 6 September tahun 2021.

Rapat paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum F-PKB terhadap nota penghantaran RAPBD 2022 perkenankan kami menyampaikan aspirasi yg berkembang di masyarakat melalui F-PKB DPRD DIY:

1. Kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi saat ini mengharuskan proses pendidikan dilakukan secara daring, tentunya hal tersebut juga memunculkan konsekuensi. Di masyarakat tidak sedikit yang mengeluh perihal pendidikan secara daring, ada persoalan waktu untuk mendampingi, ada persoalan teknologi, dan ada persoalan biaya—biaya sekolah

ditambah biaya internet dan juga ada yang tambah biaya tentor. Sementara dilain sisi sistem pemberian tugas kepada siswa dirasa belum efektif. Untuk itu F-PKB mengusulkan, di DIY diterapkan sistem pembelajaran *Video Based Learning* (Belajar Berbasis Video). Guru membuat video tentang materi yang akan dijelaskan kepada siswa kemudian dibagikan kepada siswa baru kemudian dibeikan tugas, jadi siswa memperoleh pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Karena jika langsung diberikan tugas, tidak sedikit orangtua siswa yang mengeluh tidak bisa menjelaskan materi tersebut kepada anaknya. Oleh karena itu Fraksi PKB DPRD DIY meminta kepada Pemerintah Daerah DIY untuk serius mengupayakan terselenggaranya proses pendidikan yang baik di DIY.

#### Rapat paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Penjelasan Gubernur DIY atas RAPBD DIY TA 2022 dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, maka izinkan kami Fraksi PKB memberikan pandangan umumnya, sebagai berikut:

1. Mencermati penjelasan Gubernur terhadap RAPBD DIY tahun 2022, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD DIY tahun 2022. Disamping itu pula Fraksi PKB menggaris bawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD serta prioritas-sasaran serta program yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan DIY tahun 2022.
2. Pada tahun 2022 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi adanya sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19, hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional di daerah. RKPD DIY Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RKPD DIY tahun 2022 mengusung Tema Pembangunan yaitu: ***“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”***. Terhadap tema pembangunan tersebut di harapkan mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang di selaraskan dengan RPJMD DIY 2017-2022. Sehingga dapat tercapainya target sasaran pada akhir tahun 2022, kebijakan pembangunan nasional diharapkan nantinya dapat betul-betul sinkron dengan kebijakan daerah guna terpenuhi pencapaian ketiga dimensi pembangunan nasional. Oleh karena itu atas nama Fraksi PKB DPRD DIY mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga situasi kondusifitas daerah baik melalui pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
3. Terhadap prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan fraksi kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah terhadap capaian-capaian peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta—khususnya pada masa pandemi, fraksi kami juga meminta kepada pemerintah daerah hendaknya kedepan terus memacu peningkatan dan pemertaan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan terutama di wilayah –wilayah yang jaraknya jauh dari kota.
4. Terhadap prioritas percepatan pengentasan kemiskinan Fraksi PKB DPRD DIY memandang bahwa perlu kiranya menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan kita di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan disetiap belahan dunia selalu ada tentang kemiskinan, khususnya kita di Daerah Istimewa Yogyakarta upaya untuk

melakukan percepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah merupakan langkah positif dengan harapan akan lahir terobosan – terobosan baru, hal ini tentu diharapkan agar nantinya mampu memecahkan pokok persoalan dari terjadinya kemiskinan, dampak dari persoalan kemiskinan bukan hanya terletak pada masalah individu akan tetapi menjadi persoalan kita bersama. Apalagi tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dimana target angka kemiskinan 8,5-9.0 % sementara posisi pada tahun 2020 di angka 12,80%.

5. Terhadap kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2022, fraksi kami mendukung kebijakan tersebut. Dengan harapan melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY, karena idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah, harus mampu menyumbangkan sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan . Sehubungan hal tersebut Fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah agar penggalan potensi pendapatan baru terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, dan tentunya langkah-langkah strategis yang diambil harus memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah.
6. Terhadap kebijakan Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.
7. Terhadap sektor-sektor potensial penerimaan daerah Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah/ Gubernur. Hal ini mengingat cukup besarnya sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik, seperti misalnya sektor destinasi wisata potensial yang masih banyak yang terabaikan dan belum tersentuh, hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka menumbuhkan kembangkan iklim investasi dan iklim usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan bersama pandemi Covid-19 segera berakhir dan sektor wisata dapat menyumbang pendapatan daerah secara maksimal.

Sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para sahabat yang berbahagia,

Demikian pandangan umum Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat .

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq*

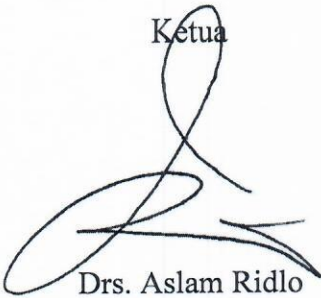
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 September 2021

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD D.I. Yogyakarta

Ketua



Drs. Aslam Ridlo



Sekretaris



Syukron Arif Muttaqin, S.E



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,  
Telp: 0274 - 512688,512820



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY  
TERHADAP  
PENJELASAN GUBERNUR DIY  
TENTANG  
NOTA KEUANGAN  
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Salam Sejahtera buat kita semua

Yth. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan lainnya

Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya

Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan dan rekan-rekan dari pers dan media massa lainnya serta segenap undangan yang berbahagia

*Alhamdulillah robbil 'alamin*, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan rapat, yang telah memberi kesempatan kepada F-PKB, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 26 Tahun 2021, dalam forum yang terhormat ini.

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), ingin mengajak kepada semua pihak khususnya kepada yang hadir dalam kesempatan ini, marilah kita selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari Covid-19. Amiiin

Selanjutnya mengamati kondisi yang berkembang dimasyarakat saat ini, Fraksi PKB sangat mengapresiasi dan mendukung terhadap penyampaian terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama-sama dengan Eksekutif dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. F-PKB berharap perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat DIY pada umumnya.

Menanggapi penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Gubernur DIY, maka izinkan kami F-PKB, memberikan pandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan, yang disebabkan adanya kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.668.432.140.144,00 dari semula sebesar Rp5.727.769.666.875,00 sebelum perubahan, mengalami penurunan sebesar Rp59.337.526.731,00. Kami (Fraksi PKB) memahami terhadap perubahan APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Sementara keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
2. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 semula direncanakan sebesar Rp 6.091.572.432.696,00 berkurang sebesar Rp 51.187.079.413,00 sehingga menjadi sebesar Rp 6.040.385.353.283,00. F-PKB menyarankan kepada seluruh SPKD di lingkungan Pemda DIY, agar benar-benar jeli di dalam membuat program agar tepat waktu dan tepat sasaran, mengingat kondisi pandemi saat ini. Mohon tanggapan.
3. Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara optimal Anggaran Pembiayaan belum dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan Anggaran Belanja. Anggaran Pembiayaan Netto yang semula direncanakan sebesar Rp 363.802.765.821,00 menjadi sebesar Rp 371.953.213.139,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.150.447.318,00 atau naik sebesar 2,24 persen. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, F-PKB menyarankan agar arah penggunaan anggaran pembiayaan untuk percepatan penanganan Covid-19 dilakukan secara cepat dan tepat, terutama penggalakan vaksinasi mengingat di DIY masih terjadi peningkatan warga yang positif Covid-19. Mohon tanggapan.

*Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat*

Demikian pandangan umum Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq*

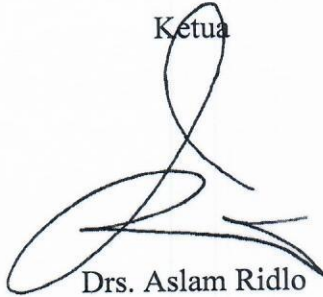
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 September 2021

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD D.I. Yogyakarta

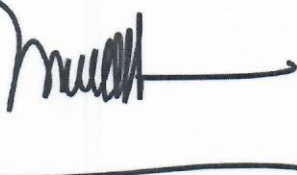
Ketua



Drs. Aslam Ridlo



Sekretaris



Syukron Arif Muttaqin, S.E



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,  
Telp: 0274 - 512688,512820



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
PENJELASAN GUBERNUR DIY  
TENTANG**

- 1. NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera buat kita semua*

- *Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;*
- *Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ;*
- *Yang kami hormati Saudara Sekda, beserta jajarannya;*
- *Yang kami hormati Rekan-Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.*

*Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY dengan acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan sehat wal 'afiat.*

Melalui kesempatan ini, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD DIY, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 25 Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 26 Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD DIY, hari Senin tanggal 6 September tahun 2021.

Rapat paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum F-PKB terhadap Nota Keuangan RAPBD 2022 dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 perkenankan kami menyampaikan aspirasi yg berkembang di masyarakat melalui F-PKB DPRD DIY:

Kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi saat ini mengharuskan proses pendidikan dilakukan secara daring, tentunya hal tersebut juga memunculkan konsekuensi. Di masyarakat tidak sedikit yang mengeluh perihal pendidikan secara daring, ada persoalan waktu untuk mendampingi, ada persoalan teknologi, dan ada persoalan biaya—biaya sekolah ditambah biaya internet dan juga ada yang tambah biaya tutor. Sementara dilain sisi sistem pemberian tugas kepada siswa dirasa belum efektif. Untuk itu F-PKB mengusulkan, di DIY diterapkan sistem pembelajaran *Video Based Learning* (Belajar Berbasis Video). Guru membuat video tentang materi yang akan dijelaskan kepada siswa kemudian dibagikan kepada siswa baru kemudian dibeikan tugas, jadi siswa memperoleh pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Karena jika langsung diberikan tugas, tidak sedikit orangtua siswa yang mengeluh tidak bisa menjelaskan materi tersebut kepada anaknya. Oleh karena itu Fraksi PKB DPRD DIY meminta kepada Pemerintah Daerah DIY untuk serius mengupayakan terselenggaranya proses pendidikan yang baik di DIY.

Rapat paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah membaca dan mencermati Penjelasan Gubernur DIY atas Nota Keuangan RAPBD 2022 dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2021, maka izinkan kami Fraksi PKB memberikan pandangan umumnya, sebagai berikut:

#### **Nota Keuangan RAPBD 2022**

1. Mencermati penjelasan Gubernur terhadap RAPBD DIY tahun 2022, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD DIY tahun 2022. Disamping itu pula Fraksi PKB menggaris bawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD serta prioritas-sasaran serta program yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan DIY tahun 2022.
2. Pada tahun 2022 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi adanya sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19, hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional di daerah. RKPD DIY Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RKPD DIY tahun 2022 mengusung Tema Pembangunan yaitu: ***“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”***. Terhadap tema pembangunan tersebut di harapkan mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD DIY 2017-2022, sehingga dapat tercapainya target sasaran pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu atas nama Fraksi PKB DPRD DIY mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga situasi kondusifitas daerah baik melalui pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
3. Terhadap prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan fraksi kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah terhadap capaian-capaian peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta—khususnya pada masa pandemi, fraksi kami juga

meminta kepada pemerintah daerah hendaknya kedepan terus memacu peningkatan dan pemertaan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan terutama di wilayah –wilayah yang jaraknya jauh dari kota.

4. Terhadap prioritas percepatan pengentasan kemiskinan Fraksi PKB DPRD DIY memandang bahwa perlu kiranya menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan kita di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan disetiap belahan dunia selalu ada tentang kemiskinan, khususnya kita di Daerah Istimewa Yogyakarta upaya untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah merupakan langkah positif dengan harapan akan lahir terobosan – terobosan baru, hal ini tentu diharapkan agar nantinya mampu memecahkan pokok persoalan dari terjadinya kemiskinan, dampak dari persoalan kemiskinan bukan hanya terletak pada masalah individu akan tetapi menjadi persoalan kita bersama. Apalagi tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dimana target angka kemiskinan 8,5-9.0 % sementara posisi pada tahun 2020 di angka 12,80%.
5. Terhadap kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2022, fraksi kami mendukung kebijakan tersebut. Dengan harapan melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY, karena idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah, harus mampu menyumbangkan sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan . Sehubungan hal tersebut Fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah agar penggalan potensi pendapatan baru terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, dan tentunya langkah-langkah strategis yang diambil harus memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah.
6. Terhadap kebijakan Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.
7. Terhadap sektor-sektor potensial penerimaan daerah Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah/ Gubernur. Hal ini mengingat cukup besarnya sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik, seperti misalnya sektor destinasi wisata potensial yang masih banyak yang terabaikan dan belum tersentuh, hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka menumbuh kembangkan iklim investasi dan iklim usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan bersama pandemi Covid-19 segera berakhir dan sektor wisata dapat menyumbang pendapatan daerah secara maksimal.

#### **Nota Keuangan Perubahan APBD 2021**

8. Perubahan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah, sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan, yang disebabkan adanya kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.668.432.140.144,00 dari semula sebesar Rp5.727.769.666.875,00 sebelum perubahan, mengalami penurunan sebesar Rp59.337.526.731,00. Kami (Fraksi PKB) memahami terhadap perubahan APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Sementara keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
9. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 semula direncanakan sebesar Rp 6.091.572.432.696,00 berkurang sebesar Rp 51.187.079.413,00 sehingga menjadi sebesar Rp 6.040.385.353.283,00. F-PKB menyarankan kepada seluruh SPKD di lingkungan Pemda DIY, agar benar- benar jeli di dalam membuat program agar tepat waktu dan tepat sasaran, mengingat kondisi pandemi saat ini. Mohon tanggapan.
10. Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara optimal Anggaran Pembiayaan belum dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan Anggaran Belanja. Anggaran Pembiayaan Netto yang semula direncanakan sebesar Rp 363.802.765.821,00 menjadi sebesar Rp 371.953.213.139,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.150.447.318,00 atau naik sebesar 2,24 persen. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, F-PKB menyarankan agar arah penggunaan anggaran pembiayaan untuk percepatan penanganan Covid-19 dilakukan secara cepat dan tepat, terutama penggalakan vaksinasi mengingat di DIY masih terjadi peningkatan warga yang positif Covid-19. Mohon tanggapan.

Sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para sahabat yang berbahagia,

Demikian pandangan umum Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat .

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq*

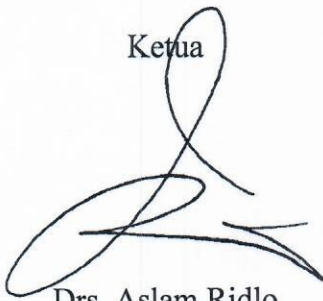
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 September 2021

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

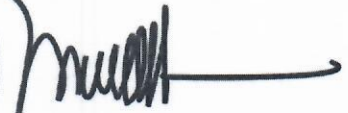
DPRD D.I. Yogyakarta

Ketua



Drs. Aslam Ridlo

Sekretaris



Syukron Arif Muttaqin, S.E